

DUKUNGAN SISTEM INFORMASI DALAM PENGELOLAAN KINERJA DAN ANGGARAN PADA IMPLEMENTASI SAKIP: STUDI KASUS BERBASIS DOKUMEN LKJIP PADA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Trie Sartika Pratiwi¹, Padriyansyah^{2*}

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumatera Selatan

Corresponding email: padriyansyah@unsri.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History Submission : 18/12/2025 Review : 20/12/2025 Revised : 21/12/2025 Accepted : 22/12/2025 Published : 22/09/2025	This study aims to analyze information system support for performance and budget management in the implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) at the Office of Cooperatives and SMEs in South Sumatra Province. The study used a qualitative descriptive approach using a documentation study method for the 2022–2024 Government Agency Performance Report (LKjIP). The analysis focused on the role of information systems in supporting the performance and budget planning process, recording realization, performance reporting, and performance monitoring and evaluation. The results indicate that performance and budget management at the Office of Cooperatives and SMEs in South Sumatra Province is supported by the use of performance information systems and regional financial management information systems. Information systems are used to set performance targets and indicators, record program and budget realization, prepare performance reports, and provide data for leadership performance evaluation. The use of these information systems enables a more consistent linkage between planning, implementation, and performance reporting, as required by the SAKIP framework. This study concludes that information systems play a key supporting instrument in public sector performance and budget management, particularly in supporting the accountability and integration of performance information in SAKIP implementation.
Keywords sistem informasi, pengelolaan kinerja, penganggaran, SAKIP, sektor publik	ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan sistem informasi dalam pengelolaan kinerja dan anggaran pada implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi dokumentasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022–2024. Analisis difokuskan pada peran sistem informasi dalam mendukung proses perencanaan kinerja dan anggaran, pencatatan realisasi, pelaporan kinerja, serta monitoring dan evaluasi kinerja.

	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja dan anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan telah didukung oleh pemanfaatan sistem informasi kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi digunakan dalam penetapan target dan indikator kinerja, pencatatan realisasi program dan anggaran, penyusunan laporan kinerja, serta penyediaan data untuk evaluasi kinerja pimpinan. Pemanfaatan sistem informasi tersebut memungkinkan keterkaitan yang lebih konsisten antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sebagaimana dituntut dalam kerangka SAKIP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem informasi berperan sebagai instrumen pendukung utama dalam pengelolaan kinerja dan anggaran sektor publik, khususnya dalam mendukung akuntabilitas dan keterpaduan informasi kinerja dalam implementasi SAKIP.</p>
--	--

PENDAHULUAN

Penerapan akuntabilitas kinerja merupakan tuntutan utama dalam tata kelola pemerintahan modern, khususnya dalam pengelolaan anggaran publik yang transparan dan bertanggung jawab. Di Indonesia, upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diwujudkan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan keterkaitan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP menuntut tersedianya informasi kinerja dan keuangan yang konsisten, terintegrasi, dan dapat ditelusuri sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Konsep akuntabilitas kinerja tersebut sejalan dengan prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang menekankan keterkaitan antara input, output, dan outcome program pemerintah (Mardiasmo, 2018). Selain itu, Bastian (2014) dan Krina (2013) menegaskan bahwa pengukuran dan pelaporan kinerja merupakan instrumen utama pertanggungjawaban publik yang hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh sistem informasi yang mampu menyajikan data kinerja dan anggaran secara terintegrasi.

Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi SAKIP tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi dan komitmen organisasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan kinerja dan anggaran. Sistem informasi berperan dalam mengintegrasikan data perencanaan, realisasi anggaran, serta capaian kinerja, sehingga mendukung keterpaduan antara dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Penelitian Safariah et al. (2025) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berperan penting dalam meningkatkan akurasi perencanaan dan pengendalian anggaran pada instansi pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem informasi merupakan instrumen strategis dalam mendukung pengelolaan kinerja berbasis anggaran. Secara konseptual, Romney dan Steinbart (2018) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu guna mendukung fungsi pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan. Dalam konteks sektor publik, Putra dan Sulistyo (2023) menekankan bahwa integrasi sistem

informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja merupakan prasyarat utama bagi konsistensi implementasi anggaran berbasis kinerja.

Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem pelaporan kinerja berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Yuliani (2014) menemukan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sementara Wardani dan Dewi (2022) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pelasing pelaporan kinerja berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan-temuan tersebut menegaskan pentingnya sistem informasi dalam mendukung pengelolaan kinerja dan anggaran sektor publik. Hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan Pratiwi dan Sari (2019) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, serta oleh Wibowo dan Maharani (2021) yang menekankan peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi anggaran dan kualitas pelaporan kinerja sektor publik.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pengaruh sistem informasi terhadap kinerja atau akuntabilitas secara umum, sementara kajian yang secara khusus menelaah peran sistem informasi dalam menghubungkan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja dalam kerangka SAKIP masih relatif terbatas, terutama pada konteks pemerintah daerah. Selain itu, masih sedikit penelitian yang menggunakan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sumber data utama untuk menelaah dukungan sistem informasi dalam implementasi SAKIP. Rahman dan Widodo (2021) mengemukakan bahwa banyak penelitian SAKIP masih memposisikan sistem informasi sebagai variabel pendukung administratif, bukan sebagai elemen strategis yang menghubungkan seluruh siklus manajemen kinerja. Padahal, LKjIP merupakan dokumen formal yang secara eksplisit merepresentasikan keterkaitan antara target kinerja, realisasi anggaran, dan capaian kinerja serta mencerminkan pemanfaatan sistem informasi dalam siklus pengelolaan kinerja instansi pemerintah (LAN, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan sistem informasi dalam pengelolaan kinerja dan anggaran pada implementasi SAKIP di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian Sistem Informasi Akuntansi sektor publik serta memberikan implikasi praktis bagi instansi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Dengan menempatkan sistem informasi sebagai elemen strategis, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara pendekatan normatif SAKIP dan praktik implementasinya di tingkat pemerintah daerah, sejalan dengan rekomendasi penguatan manajemen kinerja sektor publik berbasis bukti yang dikemukakan OECD (2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi dokumentasi, yang bertujuan untuk menganalisis peran sistem informasi dalam pengelolaan kinerja dan anggaran pada implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan data dan informasi yang terdapat dalam dokumen resmi secara mendalam dan kontekstual (Sugiyono, 2019).

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, 2023, dan 2024. Dokumen LKjIP tersebut diperoleh dari website resmi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dapat diakses pada <https://diskopukm.sumselprov.go.id/page/ppid>. LKjIP dipilih sebagai sumber data karena merupakan dokumen resmi pemerintah yang memuat informasi kinerja, penganggaran, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah (KemenPAN-RB, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dokumen secara sistematis dengan mengidentifikasi bagian-bagian dokumen LKjIP yang memuat uraian mengenai pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan kinerja dan anggaran. Penelaahan difokuskan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang didukung oleh sistem informasi.

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis) terhadap dokumen LKjIP. Analisis difokuskan pada peran dan fungsi sistem informasi dalam mendukung keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dalam kerangka SAKIP. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi dan tabel, serta dilengkapi dengan rujukan dokumen dan halaman untuk menjaga keterlacakkan dan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil analisis terhadap dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022–2024 menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah didukung oleh pemanfaatan sistem informasi kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelaahan pada LKjIP Tahun 2022, proses pengumpulan dan pengolahan data kinerja dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan kinerja berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah (LKjIP

2022, hal. 14–16). Sistem informasi tersebut digunakan untuk merekam realisasi program dan kegiatan, capaian indikator kinerja, serta realisasi anggaran secara periodik sebagai dasar penyusunan laporan kinerja.

Selanjutnya, pada LKjIP Tahun 2023, disebutkan bahwa penyusunan laporan kinerja telah memanfaatkan sistem informasi yang mendukung konsistensi data antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja (LKjIP 2023, hal. 15–17). Pemanfaatan sistem informasi ini memungkinkan terjadinya sinkronisasi data kinerja dan anggaran, sehingga data yang digunakan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja dapat disajikan secara lebih konsisten dan terverifikasi.

Peningkatan pemanfaatan sistem informasi terlihat lebih jelas pada LKjIP Tahun 2024, di mana pengelolaan data kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi melalui sistem informasi yang mendukung penerapan SAKIP (LKjIP 2024, hal. 16–18). Sistem informasi ini digunakan sebagai sarana utama dalam penyusunan laporan kinerja, termasuk dalam penyajian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), realisasi anggaran, serta analisis efisiensi penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi berperan sebagai instrumen pendukung utama dalam pengelolaan kinerja dan anggaran, khususnya dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja sebagaimana dituntut dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel 1. Dukungan Sistem Informasi dalam Implementasi SAKIP

Tahap Pengelolaan	Bentuk Dukungan Sistem Informasi	Dokumen & Halaman
Perencanaan	Penetapan target, IKU, dan anggaran berbasis aplikasi	LKjIP 2022, hal. 14–16
Pelaksanaan	Pencatatan realisasi kegiatan dan anggaran	LKjIP 2023, hal. 15–17
Pelaporan	Penyusunan LKjIP berbasis data sistem	LKjIP 2024, hal. 16–18
Monitoring & Evaluasi	Penyediaan data untuk evaluasi kinerja	LKjIP 2024, hal. 34–35

Keterangan:

Data disajikan berdasarkan hasil penelaahan terhadap uraian sistem dan mekanisme pengelolaan serta pelaporan kinerja yang tercantum dalam dokumen LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

Pembahasan

Dukungan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Kinerja dan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

telah didukung oleh pemanfaatan sistem informasi kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Dukungan sistem informasi tersebut terlihat pada keterpaduan antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program, pelaporan kinerja, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang terdokumentasi dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022–2024. Temuan ini menegaskan bahwa sistem informasi berfungsi sebagai infrastruktur utama yang memungkinkan keterkaitan antara target kinerja, realisasi anggaran, dan capaian kinerja dapat ditelusuri secara sistematis.

Pada tahap perencanaan kinerja dan penganggaran, sistem informasi digunakan untuk mengintegrasikan indikator kinerja utama (IKU) dengan alokasi anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan kinerja dan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dituntut dalam kerangka SAKIP. Secara konseptual, integrasi tersebut mencerminkan penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja, di mana sistem informasi berperan sebagai penghubung antara tujuan strategis organisasi dan penggunaan sumber daya publik (Halim & Kusufi, 2014; Mardiasmo, 2018). Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Safariah et al. (2025) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi mampu meningkatkan akurasi perencanaan dan pengendalian anggaran pada instansi pemerintah.

Dalam tahap pelaksanaan program dan kegiatan, sistem informasi digunakan untuk mencatat realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran secara periodik. Pencatatan berbasis sistem informasi memungkinkan tersedianya data realisasi yang terdokumentasi dan konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini memperkuat fungsi sistem informasi sebagai alat pengendalian manajemen, karena pimpinan instansi dapat memantau kesesuaian antara pelaksanaan program dan target kinerja secara berkelanjutan (Romney & Steinbart, 2018). Temuan ini mendukung hasil penelitian Yuliani (2014) yang menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pada tahap pelaporan kinerja, sistem informasi menjadi sumber utama data dalam penyusunan LKJIP. Data capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dihasilkan dari sistem informasi memungkinkan penyusunan laporan kinerja yang lebih konsisten, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri. Dengan demikian, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai sarana penyedia informasi akuntabel yang mendukung pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan Wardani dan Dewi (2022) serta Pratiwi dan Sari (2019) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pelaporan kinerja berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi juga mendukung proses monitoring dan evaluasi kinerja. Data kinerja dan anggaran yang tersedia dalam sistem informasi digunakan sebagai dasar evaluasi oleh pimpinan instansi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Peran ini menegaskan bahwa

sistem informasi menjadi instrumen penting dalam mendukung evaluasi kinerja berbasis bukti (evidence-based performance evaluation), sebagaimana direkomendasikan dalam praktik tata kelola sektor publik modern (OECD, 2015). Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugraha dan Astuti (2020) serta Tanan et al. (2025) yang menegaskan bahwa sistem informasi pemerintah daerah berperan strategis dalam mendukung fungsi monitoring dan evaluasi kinerja.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa dukungan sistem informasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam implementasi SAKIP. Sistem informasi berfungsi sebagai mekanisme integratif yang menghubungkan seluruh siklus pengelolaan kinerja dan anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja. Hal ini memperkuat pandangan Rahman dan Widodo (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi SAKIP sangat dipengaruhi oleh kemampuan instansi pemerintah dalam memanfaatkan sistem informasi secara optimal.

Implikasi terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Anggaran

Dukungan sistem informasi dalam pengelolaan kinerja dan anggaran memiliki implikasi penting terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketersediaan data kinerja dan anggaran yang terintegrasi memungkinkan proses pertanggungjawaban kinerja dilakukan secara lebih transparan dan dapat diverifikasi. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Bastian (2014) dan Krina (2013) yang menegaskan bahwa akuntabilitas publik hanya dapat diwujudkan apabila informasi kinerja dan keuangan disajikan secara terbuka, andal, dan mudah ditelusuri.

Selain itu, pemanfaatan sistem informasi juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi penggunaan anggaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan capaian kinerja tidak selalu diikuti oleh peningkatan penggunaan anggaran, yang mengindikasikan adanya perbaikan efisiensi pengelolaan anggaran. Hal ini menguatkan peran sistem informasi sebagai alat pendukung pengambilan keputusan manajerial dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik, sebagaimana dikemukakan oleh Anthony dan Govindarajan (2017).

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa sistem informasi memiliki peran sentral dalam mendukung implementasi SAKIP yang efektif. Penguatan pemanfaatan sistem informasi kinerja dan keuangan perlu dipandang sebagai strategi utama dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah, bukan sekadar sebagai pelengkap administratif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2022–2024 telah didukung secara signifikan oleh pemanfaatan sistem informasi kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi

tersebut berperan dalam mengintegrasikan data perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan dan evaluasi kinerja, sehingga memastikan konsistensi dan keterlacakkan informasi kinerja dan anggaran. Dengan dukungan sistem informasi, proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis data yang andal.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sistem informasi berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja dan efisiensi pengelolaan anggaran. Peningkatan capaian kinerja yang tidak selalu diikuti oleh peningkatan penggunaan anggaran mengindikasikan adanya perbaikan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Temuan ini menegaskan bahwa sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengelolaan kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perlu diposisikan sebagai bagian integral dalam penguatan implementasi SAKIP di pemerintah daerah guna meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pengelolaan anggaran publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2014). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022*. Diakses dari <https://diskopukm.sumselprov.go.id/page/ppid>.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023*. Diakses dari <https://diskopukm.sumselprov.go.id/page/ppid>.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024*. Diakses dari <https://diskopukm.sumselprov.go.id/page/ppid>.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Krina, L. L. (2013). *Indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2015). *Pedoman penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Nugraha, A., & Astuti, S. (2020). Peran sistem informasi pemerintah daerah dalam monitoring dan evaluasi kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

- OECD. (2015). *The strategy for evidence-based performance evaluation in public sector.* OECD Publishing.
- Pratiwi, T. S., & Sari, R. P. (2019). Kontribusi sistem informasi akuntansi terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Putra, A., & Sulistyo, H. (2023). Integrasi sistem informasi sebagai prasyarat implementasi anggaran berbasis kinerja. *Jurnal Tata Kelola Sektor Publik*.
- Rahman, A., & Widodo, S. (2021). Efektivitas implementasi SAKIP dan peran strategis sistem informasi. *Jurnal Manajemen Publik*.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems*. Pearson.
- Safariah, et al. (2025). Peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan akurasi perencanaan dan pengendalian anggaran pada instansi pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tanan, et al. (2025). Sistem informasi pemerintah daerah dan fungsi monitoring evaluasi kinerja. *Jurnal Inovasi Daerah*.
- Wardani, D. K., & Dewi, S. R. (2022). Penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi*.
- Wibowo, A., & Maharani, A. (2021). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi anggaran dan kualitas pelaporan kinerja sektor publik. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*.
- Yuliani. (2014). Pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.